

AGAMA, POLITIK, DAN IDEOLOGI MEDIA (ANALISIS WACANA KRITIS BERITA KORUPSI PETINGGI PARTAI POLITIK)

Iswandi Syahputra, Alip Kunandar, Fajar Iqbal
Prodi Ilmu Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

***Abstract:** There are three sides of the media business today, such as media content providers, audiences as consumers of content, and advertisers as 'consumers' other media users. All three are complementary and influence each other, although in many ways, most audiences are often sacrificed in terms of interest. When an issue arises, the media are often considered a factor called 'news value' that will attract audiences to consume and then attract advertisers to enter. At other times, the ideology of media also often affect how the news was created, directed, and then deployed. In the case of reported of corruption cases involving officials of political parties in Indonesia of 2014 election, which is affecting Luthfi Hasan Ishaq (PKS), Ratu Atut Choisyah (Golkar), and Anas Urbaningrum (Demokrat), two major media in Indonesia, Kompas and Republika presented the news in a different way. It is strongly associated with the ideology of each medium. Media ideology are then distinguish the discourse developed Kompas and Republika in reporting cases of the party officials. Results of analysis using Foucault discourse analysis showed that both the national media show a particular discourse in accordance with ideology, and on the other hand also do marginalization of certain discourses are supposed to be there. For example, the discourse of corruption as an extraordinary crime, it is not displayed, enclosed by political discourse and religious identity of each alleged case of corruption.*

***Keywords:** Discourse, Religion Identity, Politics, Media Ideology*

PENDAHULUAN

Menjelang tahun 2014, arah politik mengerucut pada dua peristiwa politik besar, yakni pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. Hajatan politik lima tahunan ini, tentu saja disambut partai politik (parpol) dengan gempita. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyambutnya, baik oleh parpol yang sudah lama berdiri (dan sudah pernah mengikuti pemilu sebelumnya), maupun oleh parpol baru yang akan mengikuti pemilu untuk pertama kalinya.

Akan tetapi, dinamika politik tak pernah berhenti di negeri ini. Selalu ada bahan untuk diberitakan, dan selalu ada kejutan. Perpindahan politisi dari satu partai ke partai lainnya banyak terjadi dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, meski pelakunya seringkali dilabeli sebagai 'politisi kutu loncat' berpindah untuk mendapatkan kesempatan dan kedudukan yang lebih baik dan lebih menguntungkan, meski dengan alasan kesamaan platform perjuangan sekalipun.

Beberapa politisi yang tetap setia dengan partainya sekalipun tak lepas dari sorotan. Berbagai kasus dialamatkan kepada mereka. Dan, sepanjang tahun 2013, berita dari para petinggi parpol terus berdatangan menghiasi kolom-kolom berita utama media nasional. Parpol-parpol dengan perolehan suara besar pada Pemilu 2014 dihadapkan pada kenyataan, adanya petinggi-petinggi mereka yang tersandung berbagai kasus besar. Kasus 'besar' bagi petinggi partai biasanya terkait dengan kasus korupsi, karena korupsi bukan hanya dianggap sebagai 'aib' bagi partai, tetapi juga bisa mengancam perolehan suara mereka pada pemilu yang sudah menunggu. Di sinilah gonjang-ganjing itu dimulai, partai berusaha untuk melepaskan diri dari aib yang dialamatkan kepadanya, entah dengan berusaha melindungi kadernya yang teribat, atau sebaliknya, berusaha melepaskan diri agar terkesan 'pro pemberantasan korupsi.' Di sisi lain, sorotan media terus meningkat.

Sepanjang kurun waktu tahun 2013, kasus-kasus korupsi yang melibatkan para petinggi parpol besar seolah tak pernah terputus. Satu kasus belum selesai, sudah muncul kasus yang lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bekerja keras untuk menyelesaikan kasus-kasus yang memiliki daya sorot tinggi itu.

Jika tidak, KPK akan terus dianggap sebagai lembaga penegak hukum yang pandang bulu dan tebang pilih. Tetapi, sejauh itu, KPK telah membuktikan, tak ada satupun orang di negeri ini yang kebal hukum, bahkan para petinggi parpol sekalipun yang sangat dekat dengan kekuasaan.

Banyak kasus korupsi yang melibatkan para petinggi parpol selama tahun 2013, termasuk 'warisan' kasus-kasus di tahun sebelumnya yang belum tuntas. Di antara sekian banyak kasus yang terjadi, ada tiga kasus korupsi yang melibatkan tiga petinggi partai besar yang menjadi sorotan publik selama tahun 2013, yakni; (1) Kasus korupsi proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor (dikenal sebagai kasus Hambalang) yang melibatkan Anas Urbaningrum, petinggi Partai Demokrat, (2), kasus korupsi impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaq, petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan (3), kasus suap Pilkada Lebak dan kasus penyediaan sarana kesehatan yang melibatkan Ratu Atut Choisyah, Gubernur Banten yang juga petinggi Partai Golkar.

Kasus korupsi yang melibatkan kader dan petinggi parpol bukan hanya tiga kasus di atas, akan tetapi, tiga kasus di atas menyedot perhatian yang cukup besar dari masyarakat, terutama juga ditunjukkan

dari besarnya sorotan media terhadap ketiga kasus tersebut, setidaknya dalam kurun waktu awal hingga akhir tahun 2013. Ini adalah kurun waktu kritis, karena kasus-kasus ini muncul menjelang Pemilu 2014 atau yang disebut sebagai 'tahun politik.' Momentum ini, mau tidak mau, membuat kasus-kasus yang seharusnya berada di ranah individu para pelakunya, terseret ke dalam pusaran politik. Identitas politik para pelaku dibawa dan disebutkan dengan jelas dalam setiap pemberitaan.

Selain identitas politik para pelaku, identitas keagamaan masing-masing pelaku juga ikut terseret ke dalamnya. Media seolah-olah menganggap bahwa, identitas politik dan keagamaan pelaku, memiliki kaitan erat dengan kasus korupsi yang dituduhkan kepada mereka. Luthfi Hasan Ishaq misalnya, identitasnya selalu dikaitkan dengan PKS yang notabene adalah partai berbasis agama Islam. Ratu Atut Choisyah dan Anas Urbaningrum yang dari partai nasionalis (Golkar dan Demokrat) juga tak dilepaskan dari identitas keagamaan mereka.

Sebagai sebuah institusi bisnis, media dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus bisa menghidupi dirinya, yakni membayar berbagai jenis pengeluaran (biaya operasional, termasuk gaji karyawan), dan tentu saja mencari keuntungan. Ada dua

sumber penghasilan utama media yang dikelola oleh swasta, yakni penghasilan dari langganan (penjualan langsung media kepada khalayak), dan pendapatan dari iklan. Sementara media yang dimiliki oleh institusi negara bisa mendapatkan pemasukan lain berupa subsidi.

Dalam hal media yang dikelola swasta yang tidak mendapatkan subsidi, seringkali pendapatan dari penjualan langsung media atau berlangganan, tidak bisa menutupi biaya operasional secara keseluruhan. Pada umumnya, media tidak membebaskan seluruh biaya operasional ke dalam produk media yang harus dibayar pelanggan, karena harga jual atau harga berlangganannya menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, media modern kemudian sangat mengandalkan penghasilan dari pemasukan iklan. Pemasukan dari iklan inilah yang kemudian digunakan untuk menutupi biaya operasional, memberi subsidi kepada pelanggan agar produk media lebih terjangkau khalayak, dan tentu saja untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian, ada tiga pihak yang terlibat dalam lingkaran bisnis media, yakni media sebagai penyedia konten, khalayak sebagai konsumen konten, dan pengiklan. James Curran (2006) menyebut hubungan ini sebagai 'segitiga bisnis media' di mana masing-masing pihak mempengaruhi

pihak lainnya. Media bekerja menyediakan konten untuk khalayak, khalayak yang berkumpul menjadi pasar bagi pengiklan, dan pengiklan menyediakan dana untuk menutupi biaya operasional media. Semakin baik konten media, akan semakin banyak khalayaknya, dan semakin banyak pula iklan yang masuk.

Meski tata kerja ketiga pihak tersebut saling melengkapi, semua tetap berasal dari upaya yang dilakukan media itu sendiri. Untuk membuat segitiga itu bekerja, media adalah yang pertama kali harus bekerja untuk menyediakan konten yang akan menarik minat khalayak. Dalam upaya menyajikan konten ini, media harus memperhatikan konten yang bisa 'dijual' kepada khalayak. Dalam konteks konten media yang berupa berita media sudah lama mengenal apa yang disebut sebagai *news value* (nilai berita). *News value* adalah penggolongan jenis-jenis berita berdasarkan daya tarik dari berita itu sendiri. Semakin tinggi daya tarik beritanya, maka semakin tinggi minat khalayak untuk membacanya. Dan menurut Curran, hal ini jelas sangat terkait dengan upaya media untuk menghimpun khalayak sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya mendapatkan pengiklan.

Ada dua macam realitas, yaitu realitas sosial dan realitas media. Realitas sosial

adalah segala sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam hal pemuatan sebuah realitas oleh media massa, tidak semua realitas sosial dapat dicakup. Media massa mempunyai keterbatasan waktu dan ruang. Selebar apa pun surat kabar, tetap tidak mungkin dapat memuat semua peristiwa yang terjadi. Realitas media adalah semua hal yang dimuat oleh media massa. Untuk pemuatannya, kita fahami beberapa kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, ada filter-filternya (termasuk melakukan *framing*). Apa yang dimuat oleh media massa hanyalah sebagian yang ada di tengah masyarakat.

Walter Lippmann mengatakan, pemuitan media itu seperti apa yang dicakup oleh sorotan lampu senter (*flashlight*). Bisa saja sorotan lampu senter tersebut berpridiah-pindah tapi tetap tidak mungkin dapat menyoroti seluruh permukaan masyarakat pada waktu yang sama. Kejadian atau apa pun yang ada di tengah masyarakat mempunyai bangunan atau konstruksi sendiri. Bangunan pertama itu disebut realitas asli atau realitas pertama. Apa yang dimuat oleh media adalah realitas tiruan atau rekonstruksi atau realitas media atau realitas kedua. Rekonstruksinya sudah menggunakan tatanan tersendiri secara teknis yang tidak mungkin sama tepatnya dengan apa yang terjadi (realitas asli).

Dengan demikian, meski menurut kaidah jurnalisme dan nilai berita sudah memenuhi syarat, namun bila bahan berita itu tidak sesuai dengan kebijaksanaan pemberitaan atau politik pemberitaan, maka tidak bisa ditindaklanjuti. Walau bahan sudah menjadi berita, tinggal dicetak, bisa dibatalkan atau ditunda. Apa boleh buat, ketentuan teknis jurnalisme dapat secara praktis dikalahkan oleh kepentingan perusahaan. Di sini, teknis pemberitaan dapat dikalahkan oleh kepentingan bisnis.

Saringan Teknis Pertama dan Kedua, sering dikatakan sebagai Politik Pemberitaan. Kedua saringan itu bersifat universal, secara teoritis berlaku di mana saja tapi dikalahkan oleh Politik Pemberitaan yang hanya berlaku intern di media masing-masing. Keberadaan Politik Pemberitaan secara praktis adalah sah. Ini adalah bagian yang disebut secara umum sebagai “kepentingan media” atau “ideologi media” dengan segala alasannya.

Dengan tanpa mengesampingkan bias teknis seperti yang sudah dijelaskan di atas, Lang dan Lang (1953, dalam McQuail 2011B: 286) bahwa media membentuk realitas dengan cara yang seringkali dibentuk oleh kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Definisi-definisi yang dibentuk oleh media dominan, seringkali digunakan oleh khalayak untuk mendefinisikan

sebuah realitas, hal ini akan lebih kuat jika didukung oleh kurangnya pengalaman pribadi individu pada masalah yang disajikan (Hartman dan Husband, 1974 dalam McQuail 2011B: 287).

Meskipun media seringkali bertindak tanpa bias yang disengaja, kecenderungan mereka yang diketahui mungkin dapat digunakan untuk tujuan manajemen berita. Kemudian, meski sebagian berita merupakan ‘bias yang tidak disadari’ dalam media, tetapi potensinya untuk mendefinisikan realitas seringkali dieksploiasi secara sengaja. Istilah ‘peristiwa semu’ (*pseudo event*) telah digunakan untuk merujuk pada kategori peristiwa yang kurang lebih dibuat untuk mendapatkan perhatian atau menciptakan kesan tertentu (Boorstin, 1961; McGinnis, 1969, dalam McQuail, 2011B: 287). Teknik penyajian peristiwa semu ini sekarang merupakan taktik yang akrab dalam banyak kampanye pemilihan (dan kampanye lainnya), tetapi yang lebih signifikan adalah kemungkinan bahwa persentase yang tinggi dari peliputan media mengenai ‘sifat aktual’ yang benar-benar membentuk peristiwa yang terencana yang ditujukan untuk membentuk kesan mendukung satu pihak ketimbang yang lain. Mereka yang mampu memanipulasi peliputan yang sesungguhnya adalah mereka yang paling berkuasa; sehingga

bias, jika ada, dapat tidak disadari oleh media, tetapi tentunya tidak demikian bagi mereka yang mencoba membentuk 'citra' mereka sendiri (Molotch dan Lester, 1974, dalam McQuail, 2011B:288).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis wacana yang dikembangkan oleh Michel Foucault (*Foucauldian Discourse Analysis*). Analisis wacana adalah istilah yang digunakan untuk pendekatan dalam analisis teks tertulis, vokal, penggunaan tanda bahasa, atau peristiwa semiotik lain yang signifikan. Objek-objek analisis wacana –wacana, teks tertulis, percakapan, peristiwa komunikasi – didefinisikan secara berbeda mengenai urutan kalimat yang koheren, proposisi, pidato, atau percakapan. Berbeda dengan banyak kajian linguistik tradisional, analisis wacana tidak hanya mempelajari penggunaan bahasa 'di balik batasan kalimat,' tetapi juga lebih memilih untuk menganalisis 'tujuan alami' penggunaan bahasa. Perbedaan penting antara analisis wacana dan teks linguistik adalah dalam hal tujuannya untuk mengungkapkan karakteristik sosio-psikologis seseorang atau sekelompok orang, daripada struktur teksnya.

Analisis wacana telah digunakan dalam berbagai disiplin ilmu sosial, termasuk di

dalamnya linguistik, pendidikan, sosiologi, antropologi, psikologi kognitif, psikologi sosial, studi kawasan, kajian budaya, hubungan internasional, komunikasi, dan lain sebagainya. Masing-masing disiplin ilmu ini mengembangkan asumsi, dimensi analisis, dan juga metodenya masing-masing. Topik-topik analisis wacana sendiri meliputi: 1) berbagai tingkatan atau dimensi wacana, seperti suara (intonasi dan lain-lain), gerak tubuh, sitaksis, leksikon, gaya, retorika, makna, tindak tutur, gerak, strategi, putaran, dan lain-lain yang terkait dengan aspek interaksi; 2) genre wacana (berbagai jenis wacana politik, media, pendidikan, ilmu pengetahuan, bisnis, dan lain-lain); 3) Hubungan antara wacana dan munculnya struktur sintaksis; 4) hubungan antara teks (wacana) dengan konteks; 5) hubungan antara wacana dan kekuasaan; 6) hubungan antara wacana dan kognisi-memori

Fokus analisis wacana adalah pada bahasa. Akan tetapi, dalam memperlakukan bahasa, terdapat tiga cara pandang yang berbeda, yakni pandangan positivis, pandangan konstruktivis, dan pandangan kritis. *Pandangan positivis* melihat bahasa sebagai jembatan dunia dengan objek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa

tanpa ada kendala atau distorsi, sejauh ia dinyatakan dengan memakai pernyataan yang logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. *Pandangan konstruktivis*, memandang bahasa tidak sekadar alat untuk memahami realitas objektif belaka dan yang dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pernyataan. Pandangan ini justru melihat bahwa subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Dalam pandangan ini, bahasa dianggap diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang bertujuan. Sedangkan *pandangan kritis* memperkuat pandangan konstruktivis dengan membawa wacana pada proses yang lebih jauh, yakni pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional (Hikam dalam Eriyanto: 4-6).

Di Eropa, Michel Foucault yang mempelajari pekerjaan Leo Spitzer kemudian mengembangkan analisis wacana ke arah yang berbeda. Dalam karyanya, *The Archaeology of Knowledge (L'archeologie du Savoir)* (1969), Foucault tidak lagi mengarahkan wacana pada aspek linguistik formal, tetapi menyoroti pola institusionalisasi pengetahuan yang menjadi manifest dalam struktur disiplinnya, dan dikerjakan oleh hubungan antara pengetahuan dengan kekuasaan.

Sejak tahun 1970-an, karya Foucault memberi dampak pada peningkatan penggunaan analisis wacana dalam ilmu sosial. Dengan demikian, dalam ilmu sosial modern di Eropa, kita dapat menemukan berbagai macam pendekatan yang berbeda dengan menggunakan definisi wacana dari Foucault dan konsep teoritisnya.

Dalam bukunya ini, Foucault menyatakan bahwa, sistem pemikiran dan pengetahuan (*epistemes* atau *discursive formations*) dijalankan oleh aturan-aturan (di luar tata bahasa dan logika) yang beroperasi di bawah kesadaran individu yang menjadi subjek, dan menetapkan kemungkinan konseptual yang menentukan batas-batas pemikiran dan penggunaan bahasa dalam domain dan jangka waktu tertentu. Foucault berpendapat bahwa, studi kontemporer sejarah mengenai ide-ide, meskipun targetnya waktu transisi antara pandangan sejarah, akhirnya bergantung pada kontinuitas yang dipecahkan melalui pengamatan yang mendalam. Sejarah mengenai ide-ide menandai titik-titik diskontinuitas antara model pengetahuan telah didefinisikan secara luas, tetapi asumsi mengenai model yang sudah ada itu secara keseluruhan gagal untuk meluruskan kompleksitas dari wacana. Foucault berpendapat bahwa 'wacana' muncul dan berubah, bukan

berdasarkan serangkaian pengembangan pengartikulasian, cara pandang umum, tetapi menurut satu set yang luas dan kompleks dari hubungan diskursif dan kelembagaan, yang didefinisikan sebanyak-banyaknya melalui pemutusan dan pemecahan dengan tema yang terpadu; pada kenyataannya, diskontinuitas merupakan komponen integral dari formasi diskursif yang disatukan.

Diskontinuitas dalam wacana dapat berbentuk kontradiksi internal, dan di sini juga Foucault mengambil sejarah ide-ide karena gagal memeriksa asumsinya sendiri. Sejarah ide-ide sangat tergantung pada pandangan kontradiksi diskursif sebagai hambatan yang akan dijelaskan dalam analisis sejarah. Paradoksnya, bagaimanapun, hal ini juga menjadikan kontradiksi semakin mendalam, prinsip yang hampir metafisik pada hal apa wacana terkait (tanpa kontradiksi, apa lagi yang harus diperbincangkan?). Foucault melihat kedua pengertian ini kontradiktif karena menggambarkan adanya upaya-upaya 'pelanggaran' karena menggambarkan sebuah wacana dengan cara mereka sendiri. Baginya, kontradiksi adalah bentuk lain dari pelabelan dari serangkaian proses diskursif yang sangat beragam. Kritik Foucault tidak hanya diasumsikan sebagai bentuk kontinuitas sejarah, tetapi juga asumsi

bahwa diskontinuitas sejarah adalah salah satu kontinuitas juga.

Penekanan Foucault tentang diskontinuitas juga merupakan sebuah fungsi dari pembatasan definisinya sendiri tentang apa wacana itu dan usahanya yang tak kenal lelah untuk menjelaskan wacana secara jelas, penjelasan mengenai detailnya, tanpa ada interpretasi. Metode arkeologi yang dikembangkannya bertujuan untuk menggambarkan wacana hanya dalam keberadaan aktifnya di dunia, dan menjauhkannya dari hal lain di luar pernyataan itu sendiri, dan hubungannya dengan pernyataan lain yang dijelaskan. Ini berarti, arkeologi harus mengasumsikan apa-apa tentang kesatuan yang tersembunyi dan diam-diam mengikat bersama-sama dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang, bahwa setiap kesatuan diskursif harus dijelaskan lagi dalam istilahnya itu sendiri.

Analisis wacana yang dikembangkan oleh Foucault, belakangan dikenal dengan *Foucauldian Discourse Analysis* memberi penekanan pada hubungan kekuasaan di dalam masyarakat yang diungkapkan melalui praktik dan bahasa. Metode ini biasanya digunakan untuk menganalisis bagaimana dunia sosial, yang dinyatakan melalui bahasa, dipengaruhi oleh berbagai sumber kekuasaan. Dengan

demikian, pendekatan ini dekat dengan konstruktivisme sosial, sebagaimana para peneliti berusaha untuk memahami bagaimana masyarakat kita sedang dibentuk atau dibangun, melalui bahasa, yang pada gilirannya mencerminkan hubungan kekuasaan yang ada (Given, 2008:249).

Bagi Foucault, wacana adalah ide teoritis paling luas dalam arkeologi. Istilah ini memiliki sejarah sebagai objek studi dari setiap jenis baru dari sejarah, yakni sejarah dari ide-ide atau gagasan. Dengan demikian, metode penelitian wacana harus pada 'apa yang dikatakan sesuatu' dalam kemunculan dan transformasinya, tanpa spekulasi tentang keseluruhan dari makna kolektif pernyataan itu. Dengan demikian, arkeologi bukan untuk menjelaskan sejarah melalui wacana, tetapi menggambarkan sejarah dari sebuah wacana.

Foucault menurunkan wacana ke dalam unit paling kecil dari 'apa yang dikatakan sesuatu' tadi, yakni dalam bentuk pernyataan. Sama seperti wacana yang tidak pernah diambil sebagai bagian tanda dari kebenaran sejarah yang lebih besar yang sebagian tersembunyi, sehingga pernyataan individu tidak pernah dianggap sebagai ekspresi psikologi, atau bahkan sebagai kendaraan bagi makna referensial dan proposisi. Foucault menempatkan

pernyataan hanya dalam kondisi tertentu dari kemunculan dan transformasinya yang kadang diskursif dan kadang juga terlembagakan. Dengan demikian, wacana tidak hanya satu set proposisi yang diartikulasikan, juga bukan jejak psikologi yang dinyatakan secara tersembunyi, semangatnya, atau diarahkan pada sejarah dari gagasannya saja; tetapi hal itu adalah himpunan dari hubungan-hubungan di mana semua faktor membentuk sebuah 'rasa' (dengan kondisi-kondisinya yang memungkinkan).

Analisis wacana Foucault mencoba untuk memahami bagaimana individu melihat dunia, dan mempelajari kategorisasi, hubungan pribadi dan institusional, ideologi, dan politik. *Foucauldian Discourse Analysis* terinspirasi oleh karya kedua Foucault dan Jacques Derrida, juga oleh pendekatan psikoanalisis dan teori kritis. Seperti umumnya teori kritis, biasanya banyak digunakan untuk studi yang berorientasi politik. Hal ini banyak digunakan oleh para peneliti yang mengkritisi bentuk-bentuk analisis wacana tradisional yang dianggap gagal memperhitungkan implikasi politis dari sebuah wacana (Wooffit, 2005: 147).

Secara praktis, Analisis Wacana Foucault, bisa digunakan untuk melihat bagaimana tokoh-tokoh yang memiliki

otoritas menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dominasi mereka, dan bagaimana mereka mengarahkan khalayak untuk mentaati atau mengikuti apa yang mereka harapkan. Dalam praktik propaganda misalnya, kita bisa menggunakannya untuk melihat bagaimana propagandis menggunakan sumber daya mereka untuk mengembangkan wacana dominan mereka kepada khalayak, termasuk upaya-upaya untuk mendapatkan penerimaan, dukungan, dan kepatuhan dari khalayak pada wacana yang mereka kembangkan. Sebaliknya, analisis ini juga bisa digunakan untuk melihat upaya perlawanan terhadap wacana dominan tersebut, misalnya dalam praktik yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni *counterpropaganda*.

Gavin Kendall & Gary Wickham (1999) menggarisbawahi lima langkah penting dalam menggunakan Analisis Wacana Foucault. Langkah *pertama* adalah pengenalan sederhana bahwa wacana adalah sekumpulan pernyataan yang diorganisir secara teratur dan sistematis, *kedua*, bagaimana pernyataan-pernyataan itu dibuat, *ketiga* apa yang bisa dikatakan (tertulis) dan apa yang tidak (tersembunyi), *keempat* adakah ruang yang diciptakan untuk menghasilkan pernyataan-pernyataan baru, dan *kelima* pembuatan

materi diskursif dan praktis pada saat yang bersamaan (Kendall & Wickham, 1999: 27).

Eriyanto (2001), mengadopsi cara Sara Mills untuk memahami cara kerja Analisis Wacana Foucault, menyodorkan dua fokus utama dalam memahami sebuah wacana, yakni (1) bagaimana wacana itu diproduksi, dan (2) melihat kemungkinan adanya wacana yang ter atau dipinggirkan.

Untuk memahami bagaimana wacana itu diproduksi, kita harus memahami adanya struktur diskursif dalam wacana. Untuk itu, kita harus melihat adanya keterkaitan antara wacana dengan realitas. Realitas dipahami sebagai seperangkat konstruk yang dibentuk melalui wacana. Struktur diskursif ini membuat objek atau wacana terlihat nyata oleh kita. Persepsi kita tentang suatu objek, dibatasi oleh pandangan yang mendefinisikan sesuatu bahwa yang ini benar dan yang itu adalah salah, dengan kata lain, wacana itu merupakan sebuah wilayah dimana khalayak berpikir dengan jalan tertentu, bukan dengan yang lain.

Melalui wacana, realitas yang disebarakan kepada individu bukan hanya didefinisikan, tetapi juga dibentuk, dikontrol, dan didisplinkan. Sebagai contoh, pembagian kerja dalam rumah tangga (terutama di Indonesia) selalu menempatkan laki-laki sebagai orang

yang harus bekerja di luar rumah untuk menghidupi keluarganya, sedangkan perempuan berada di rumah untuk mengurus anak-anak dan rumahtangganya. Struktur diskursif ini membuat orang kemudian berpikir tentang benar dan salah, benar jika lelaki bekerja di luar dan salah jika ia yang justru mengurus rumah tangga sementara istrinya yang bekerja.

Struktur diskursif ini, lebar dan terkait dengan banyak konteks besar yang akhirnya melahirkan narasi kebudayaan. Dalam prosesnya, individu mengkategorisasikan dan menafsirkan pengalaman dan peristiwa mengikuti struktur diskursif ini. Jika ini sudah terbentuk, individu atau khayak akan sulit keluar dari struktur diskursif yang terbentuk ini. Struktur ini menjadi besar dan secara sistematis batasan-batasan itu membentuk sebuah episteme, yakni perangkat dari struktur diskursif sebagai suatu keseluruhan melalui mana kebudayaan berpikir. Melalui episteme itu individu mengerti dan memahami suatu objek dengan pernyataan dan pandangan tertentu, bukan pandangan yang lain. Unit-unit diskursif ini mengasumsikan koherensi dan kohesivitas sebagai suatu ide. Dari sinilah biasanya individu bisa menggolongkan sesuatu sebagai 'pandangan modern' atau 'pandangan kuno.'

Selain wacana yang diproduksi melalui struktur diskursif tadi (sehingga melahirkan wacana dominan), hal lain yang harus diperhatikan adalah adanya wacana yang terpinggirkan (*marginalized*) dan wacana yang terpendam (*submerged*). Ada dua konsekuensi dari wacana dominan. *Pertama*, wacana dominan memberikan arahan bagaimana suatu objek harus dibaca dan dipahami. Pandangan yang lebih luas menjadi terhalang, karena ia memberikan pilihan yang tersedia dan siap pakai. Pandangan dibatasi hanya dalam batas-batas struktur diskursif tersebut, tidak dengan yang lain. *Kedua*, struktur diskursif yang tercipta atas suatu objek tidaklah berarti kebenaran. Batas-batas yang tercipta tersebut bukan hanya membatasi pandangan, tetapi juga menyebabkan wacana lain yang tidak dominan menjadi terpinggirkan. Setiap kekuasaan pada dasarnya berusaha untuk membentuk pengetahuannya sendiri, menciptakan rezim kebenaran sendiri. Kekuasaan selalu datang dengan memproduksi suatu ekonomi politik kebenaran, melalui mana kekuasaan dengan begitu dimapankan, disusun, diwujudkan, dan dilestarikan. Oleh karena itu, dalam analisis wacana kita harus melihat bagaimana produksi wacana atas suatu hal diproduksi dan bagaimana reproduksi itu dibuat oleh kelompok atau

elemen di dalam masyarakat (Eriyanto, 2001: 65-84).

Proses terpinggirkannya (atau dipinggirkan) suatu wacana, membawa beberapa implikasi. *Pertama*, khalayak tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi yang beragam dari berbagai sudut mengenai suatu peristiwa atau gagasan. Di sini tidak harus dikatakan bahwa wacana yang terpinggirkan adalah wacana yang benar, tetapi karena tidak banyak ragam perspektif dari suatu wacana, maka dimensinya menjadi tidak lengkap. *Kedua*, bisa jadi peminggiran wacana menunjukkan praktik ideologi. Seringkali seseorang, suatu kelompok, suatu gagasan, tindakan, atau kegiatan, terpinggirkan dan menjadi marjinal lewat penciptaan wacana-wacana tertentu (Riggins dalam Eriyanto, 2001: 84).

Dalam penelitian ini, penetapan populasi dan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Pemberitaan mengenai kasus korupsi petinggi parpol diambil dari tiga media cetak yang terbit secara nasional, yakni *Kompas* dan *Republika*. Pemilihan kedua media ini dilandaskan pada asumsi bahwa media-media tersebut diedarkan secara nasional, tidak memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu, dan dianggap media yang telah menjalankan proses jurnalistik yang baik. Sedangkan

sampel berita yang diambil dari masing-masing media adalah pemberitaan ketiga kasus korupsi petinggi parpol seminggu sebelum penetapan status tersangka, dan seminggu sesudahnya. Dengan demikian, diperoleh sampel berita dalam rentang waktu sebagai berikut: 1) berita kasus Luthfi Hasan Ishaq, tanggal 24 Januari - 7 Februari 2013; 2) berita kasus Anas Urbaningrum, tanggal 15 Februari - 1 Maret 2013; dan 3) berita kasus Ratu Atut Chosiyah, tanggal 10-24 Desember 2013.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Wacana Diproduksi

a. Kompas

Berita *Kompas* mengenai Luthfi Hasan Ishaq sepanjang 23 Januari sampai 7 Februari 2013, terfokus pada bagaimana gerakan dan perkembangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pasca penetapan Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi. *Kompas* memuat berbagai gonjangan yang terjadi di internal partai itu, serta berbagai tekanan yang menjurus ke PKS berkaitan dengan ditetapkannya presiden PKS sebagai tersangka.

Kompas nampaknya tidak terlalu tertarik untuk memberitakan perkembangan hukum Luthfi. *Kompas* hanya memberitakan kabar-kabar

yang keluar sepanjang proses hukum tersebut, seperti dugaan Luhfi memiliki kedekatan dengan Menteri Pertanian Suswono, sementara fokus berita masih cenderung membahas dampak yang dirasakan internal PKS.

Berita-berita yang diturunkan *Kompas* mengenai PKS tersebut diantaranya adalah, membedah internal partai dan kemelut yang terjadi di dalamnya pascapenetapan tersangka Luthfi; gerakan-gerakan PKS dalam menangani masalah internal tersebut; langkah-langkah yang diambil PKS untuk mempertahankan kader-kader partainya, dan; pembelaan PKS terhadap Luthfi, serta beberapa berita lain tentang PKS.

Sementara dalam pemberitaan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap Pilkada Lebak tanggal 17 Desember 2013, *Kompas* lebih sering menaikkan berita yang terlihat cukup netral. Namun demikian, dalam beberapa berita yang dimuat *Kompas* nampak pula beberapa berita yang benada profokatif dan menyudutkan posisi Atut. Sebagaimana berita tanggal 21 dengan judul *Dinasti Atut Benar-benar Runtuh*, memuat berita yang menyangkut beberapa orang dekat

Atut ke dalam kasus-kasusnya. *Kompas* juga sempat menyinggung reaksi Partai Golkar atas penetapan Atut sebagai tersangka. Namun sepanjang ini tidak nampak adanya penyudutan pada posisi Golkar dalam kasus Atut. Sepanjang satu pekan sebelum dan sesudah ditetapkannya Atut menjadi tersangka, *Kompas* tidak tercatat menaikkan frekwensi berita tentang Atut. Pemberitaan Atut dimuat dalam intensitas yang cukup wajar, yakni rata-rata antara satu hingga tiga berita perhari. Dalam beberapa hari *Kompas* juga tercatat tidak menayangkan berita mengenai Atut samasekali.

Dalam harian *Kompas*, pemberitaan kasus Hambalang yang melibatkan ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum sepekan sebelum dan setelah ditetapkannya Anas sebagai tersangka, yakni dari tanggal 15 Februari 2013 hingga 1 Maret 2013, tercatat tidak menerbitkan berita Anas dengan frekuensi yang berlebih. Porsi berita mengenai Anas dan kasus Hambalang masih dalam batas frekwensi yang cukup seimbang. Sepanjang periode ini *Kompas* menurunkan satu sampai tiga berita perhari.

Sepekan sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal

22 Februari 2013, *Kompas* memuat beberapa berita terkait Hambalang, namun sepanjang periode itu *Kompas* belum menyebut-nyebut nama Anas secara langsung. Berita-berita *Kompas* yang turun periode 15-21 Februari terkait Hambalang hanya tercatat satu kali menyebut nama Anas dalam judul beritanya, yakni pada berita berjudul *KPK Belum Putus Anas (19/02/13)*. Dari segi isi, *Kompas* cenderung membeberkan bagaimana kronologi kasus tersebut terjadi, disertai beberapa perkembangan proses hukum Anas. Tidak ditemukan berita-berita yang menyudutkan Anas. Namun demikian, dalam beberapa berita disinggung pula gejolak yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat pasca ditetapkannya Anas sebagai tersangka.

b. Republika

Dalam pemberitaan kasus suap impor daging sapi dengan tersangka presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, sebelum penetapan Luthfi sebagai tersangka pada 31 Januari 2013, *Republika* belum menurunkan berita yang menyinggung Luthfi. Berita yang dimuat *Republika* pada tanggal 3 Februari 2013 justru memuat pembelaan Luthfi pada kasus suap daging impor dengan berita yang berjudul *Luthfi Mengaku Tak*

Tahu (3/02/13). Selebihnya, *Republika* banyak mengangkat berita yang lebih terfokus pada berbagai gerakan PKS dalam menangani kasus ini.

Republika cenderung menerbitkan berita yang cukup menguntungkan pihak Luthfi dan PKS. *Republika* tidak nampak membeberkan kasus Luthfi sebagai borok PKS, namun lebih pada bagaimana mengungkap fakta tentang Luthfi terutama langkah maju yang dilakukan PKS dalam menanggapi kasus itu.

Terlihat, sejak kasus Luthfi mengemuka *Republika* tidak serta-merta memuat pemberitaan tentang penetapan Luthfi sebagai tersangka oleh KPK. Akan tetapi *Republika* justru banyak menaikkan berita tentang berbagai pembelaan oleh PKS seperti berita dengan judul *PKS Investigasi Kasus Luthfi (5/02/13)* yang dimuat tanggal 4 Februari 2013. Selain itu, *Republika* beberapa kali dalam beritanya juga mempertanyakan kinerja KPK dalam kasus Luthfi. Beberapa berita seperti berita lain yang dimuat tanggal 4 Februari 2013 dengan judul *KPK Bermain Petak Umpet (4/02/13)*, menunjukkan keraguan terhadap badan hukum yang memegang kuasa atas kasus Luthfi tersebut.

Berita *Republika* terkait kasus korupsi alat kesehatan Provinsi Banten yang menyeret gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, juga memiliki kecenderungan yang hampir sama dengan koran lain, dimana sebelum ditetapkannya Atut sebagai tersangka pada 17 Desember 2013, tidak ditemukan berita mengenai Atut. *Republika* mulai banyak memuat berita Atut sejak sehari setelah Atut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus alat kesehatan dan suap kepada ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Sepanjang periode 10-16 Desember 2013, tidak ditemukan pemberitaan Atut di harian *Republika*. Namun pada tanggal 18 Desember 2013, sehari setelah Atut ditetapkan menjadi tersangka, *Republika* memuat sedikitnya lima berita terkait. Lima berita tersebut diantaranya berjudul *Atut Akan Ditahan; Korupsi di Banten Sudah Merajalela; Fee dan Instruksi yang Menjerat Atut; Citra Kepala Daerah Makin Negatif*, dan; *Ibu tak Terlibat Korupsi Apapun*.

Republika banyak memberitakan beberapa gambaran Banten yang disebut-sebut telah menjadi wilayah yang cukup korup, dimana korupsi merajalela di kalangan pejabat

pemerintahannya. Hanya saja, pada pemberitaan *Republika* posisi penyudutan terhadap Atut dan Golkar khususnya tidak dinyatakan secara nyata. Berita dan judul yang dimuat *Republika* cenderung samar, seperti berita berjudul *Dana Atut Bisa ke Parpol (19/12/13)*, menunjukkan adanya hubungan antara partai dimana Atut bernaung (Golkar) serta kemana uang Atut bermuara. Dalam berita ini tidak dikatakan secara jelas apakah ada dana dari Atut yang mengalir ke Partai Golkar. Dan hari berikutnya, 20 Desember 2013, Golkar kemudian juga disebut-sebut dalam kasus Atut pada berita yang memuat judul *Kasus Atut Pengaruhi Golkar*. Berita lain sepanjang periode ini mengenai Atut, adalah status Atut dan wakilnya Rano Karno.

Dalam pemberitaan *Republika* terkait kasus Hambalang yang menyeret Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, *Republika* dapat dikatakan berada posisi yang cukup netral. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya intenitas berita *Republika* yang masih wajar. Tercatat sepanjang tanggal 15-21 Februari *Republika* tidak setiap hari memuat berita terkait Anas, dan terhitung hanya menurunkan beberapa berita terkait.

Selain itu, porsi pemberitaan kasus Hambalang dan Anas, dalam beberapa berita, dinilai cenderung menguntungkan posisi Anas. Sebagai misal berita yang diturunkan *Republika* tanggal 25 Februari 2013 yang berjudul *Menunggu Anas Keluarkan Kartu Truf (25/02/13)*, nampak menempatkan Anas sebagai sosok yang memiliki nilai tawar pada kasus ini. Pada berita-berita yang dimuat sebelumnya, *Republika* nampak menampilkan beberapa komentar beberapa orang yang bernada dukungan pada Anas. Seperti narasumber Saiful Umam dalam berita berjudul *Anas Teken Pakta (15/02/13)* yang menyebut-nyebut Anas sebagai politisi yang memiliki nilai tawar lebih dibanding dengan politisi Partai Demokrat lainnya. Selain itu, berita lain berjudul *Anas Tersangka, Masa HMI Demo (27/02/13)*, menunjukkan adanya kelompok loyalis yang cukup mengakar di belakang Anas.

Dari keseluruhan berita yang terbit di koran *Republika*, memang hampir tidak ada nada yang menyudutkan posisi Anas dalam kasus Hambalang, kecuali sebuah pernyataan dari narasumber Ulil Absar Abdala yang menyebut Anas sebagai “Bayi yang tidak diinginkan”, yang kemudian diangkat sebagai judul

sebuah berita dan dimuat tanggal 28 Februari 2013. Selebihnya, *Republika* memberitakan Anas dan Hambalang pada jarak yang cukup netral, tanpa adanya penyangkutan Partai Demokrat dan lembaga-lebaga lain yang pernah disinggahi Anas.

2. Wacana Terpinggirkan

a. Kompas

Sabtu 2 Februari 2013, *Kompas* menurunkan berita berjudul “PKS 2014 Tergantung Proses Hukum Luthfi” yang membahas alasan pengunduran diri Luthfi dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Berita ini, mengaitkan kasus Luthfi dengan persoalan politik, yakni persoalan PKS yang notabene adalah partai berbasis agama yang disebut dalam berita itu antikorupsi, sebuah terminologi akhlak partai berdasarkan ajaran agama Islam.

Kompas banyak memberitakan kasus Luthfi setelah penetapannya sebagai tersangka. Sebelum ditetapkannya Luthfi sebagai tersangka pada 31 Januari 2013, kolom berita *Kompas* masih belum ditemukan menyinggung-nyinggung kasus suap impor daging sapi. *Kompas* tercatat menaikkan berita Luthfi yang dengan langsung menyinggung PKS pada

tanggal 2 Februari 2013 dengan judul yang cenderung menyudutkan Partai Keadilan Sejahtera yang dipresideni Luthfi dengan judul *PKS 2014 Tergantung Proses Hukum Luthfi*. Berita ini, menjelaskan kronologis bagaimana kronologis kasus hingga proses hukum terbaru yang dikenakan pada Luthfi, serta banyak menyinggung nasib PKS terutama pada agenda politik 2014 PKS yang dinilai akan gagal dengan ditangkapnya Luthfi oleh KPK.

Secara umum, berita *Kompas* sepanjang 23 Januari sampai 7 Februari 2013, sepekan sebelum dan sesudah Luthfi ditetapkan menjadi tersangka, lebih terfokus pada bagaimana gerakan dan perkembangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terutama pasca penetapan Luthfi sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi. *Kompas* memuat berbagai gonjang-ganjing yang terjadi di internal partai itu, serta berbagai tekanan yang menjurus ke PKS berkaitan dengan ditetapkannya presiden PKS sebagai tersangka.

Kompas cenderung tidak terlalu tertarik untuk memberitakan perkembangan hukum Luthfi. *Kompas* hanya memberitakan kabar-kabar yang keluar sepanjang proses hukum tersebut, seperti dugaan Luthfi memiliki

kedekatan dengan Menteri Pertanian Suswono, dan menyinggung sedikit isu lain seputar orang dekat Luthfi. Sementara fokus berita masih cenderung membahas dampak yang dirasakan internal PKS.

Hal ini terlihat dari berita-berita yang diturunkan *Kompas* mengenai PKS yang diantaranya membedah internal partai dan kemelut yang terjadi di dalamnya pasca penetapan tersangka Luthfi; gerakan-gerakan PKS dalam menangani masalah internal tersebut; langkah-langkah yang diambil PKS untuk mempertahankan kader-kader partainya, dan; pembelaan PKS terhadap Luthfi, serta beberapa berita lain tentang PKS.

Namun demikian nada berita yang dimuat di *Kompas*, tidak secara langsung mengadili kasus yang terjadi terhadap presiden PKS itu. Tidak banyak ditemukan diksi-diksi negatif yang memberatkan pihak Luthfi dan PKS. Berita yang banyak dimuat adalah beberapa agenda konsolidasi dan terkait program PKS di 2014 yang pasti terganggu, serta beberapa pembelaan dari pihak PKS.

Dalam pemberitaan mengenai Ratu Atut Chosiyah, *Harian Kompas*, dalam pemberitaan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang ditetapkan

KPK sebagai tersangka dalam kasus alat kesehatan dan suap tanggal 17 Desember 2013, tercatat mengalami pergantian model, dimana sepekan sebelum ditetapkannya Atut sebagai tersangka, berita-berita *Kompas* terkait Atut cukup sedikit. Berita *Kompas* sebelum penetapan Atut, lebih banyak memuat berita tentang Akil Mochtar, dan sedikit mulai merembet kepada nama Ratu Atut Chosiyah.

Frekwensi *Kompas* dalam menurunkan berita Atut mulai naik sejak penetapan Atut menjadi tersangka. Tercatat periode 18-24 Desember 2013, berita Atut di *Kompas* meningkat menjadi satu sampai tiga berita perhari.

Sepanjang ini, *Kompas* tercatat lebih sering menaikkan berita yang cukup netral. Namun demikian, dalam beberapa berita yang dimuat *Kompas* nampak pula beberapa berita yang benada profokatif dan menyudutkan posisi Atut. Sebagaimana berita tanggal 21 dengan judul *Dinasti Atut Benar-benar Runtuh*, memuat berita yang menyangkutkan beberapa orang dekat dan keluarga Atut ke dalam kasus-kasusnya. Pada tanggal yang sama, *Kompas* juga menempatkan foto Atut di halaman utama dengan judul besar *Atut Menangis Tersedu-sedu*.

Kompas juga sempat menyinggung reaksi Partai Golkar atas penetapan Atut sebagai tersangka. Penyangkutan Golkar pada kasus Atut, antara lain dapat dilihat pada berita *Kompas* edisi 23 Desember 2013 yang berjudul *Golkar Sesalkan Penahanan Atut*. Namun sepanjang ini, tidak nampak adanya penyudutan yang signifikan pada posisi Golkar dalam kasus Atut.

Sepanjang satu pekan sebelum dan sesudah ditetapkannya Atut menjadi tersangka, *Kompas* kemudian juga tidak tercatat menaikkan frekwensi berita tentang Atut. Pemberitaan Atut dimuat dalam intensitas yang cukup wajar, yakni rata-rata antara satu hingga tiga berita perhari. Dalam beberapa hari *Kompas* juga tercatat tidak menayangkan berita tentang Atut sama sekali.

Dalam harian *Kompas*, pemberitaan kasus Hambalang yang melibatkan ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum sepekan sebelum dan setelah ditetapkannya Anas sebagai tersangka, yakni dari tanggal 15 Februari 2013 hingga 1 Maret 2013, tercatat tidak menerbitkan berita Anas dengan frekuensi yang berlebih. Porsi berita mengenai Anas dan kasus Hambalang masih dalam batas frekwensi yang

cukup seimbang. Sepanjang periode ini Kompas menurunkan satu sampai tiga berita perhari.

Sepekan sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 Februari 2013, Kompas memuat beberapa berita terkait Hambalang, namun sepanjang periode itu *Kompas* belum menyebut-nyebut nama Anas secara langsung, kendati di beberapa media lain seperti Tempo telah dengan sangat terbuka menyebut Anas seakan-akan telah benar-benar menjadi tersangka.

Berita-berita Kompas yang turun periode 15-21 Februari terkait Hambalang hanya tercatat satu kali menyebut nama Anas dalam judul beritanya, yakni pada berita berjudul *KPK Belum Putus Anas (19/02/13)*. Akan tetapi dalam berita ini Anas cenderung diuntungkan. Berita ini memuat dua komentar dari Johan Budi, dan pengacara Anas sendiri, Patra M. Dalam komentarnya Johan cenderung netral, sementara pengacara Anas memberikan komentar positif, sehingga posisi Anas mendapat keuntungan pada berita ini.

Dari segi isi, *Kompas* cenderung membeberkan bagaimana kronologi kasus tersebut terjadi, disertai beberapa

perkembangan proses hukum Anas. Tidak ditemukan berita-berita yang menyudutkan Anas. Namun demikian, dalam beberapa berita disinggung pula gejala yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat pasca ditetapkannya Anas sebagai tersangka.

b. Republika

Dalam pemberitaan Republika terkait kasus Hambalang yang menyeret ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, *Republika* dapat dikatakan berada posisi yang cukup netral. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya intensitas berita *Republika* yang masih wajar. Tercatat sepanjang tanggal 15-21 Februari Republika tidak setiap hari memuat berita terkait Anas, dan terhitung hanya menurunkan beberapa berita terkait.

Selain itu, porsi pemberitaan kasus Hambalang dan Anas, dalam beberapa berita, cenderung menguntungkan posisi Anas. Sebagai misal berita yang diturunkan Republika tanggal 25 Februari 2013 yang berjudul *Menunggu Anas Keluarkan Kartu Truf (25/02/13)*, nampak menempatkan Anas sebagai sosok yang memiliki nilai tawar pada kasus ini. Pada berita-berita yang dimuat sebelumnya, Republika

nampak menampilkan beberapa komentar beberapa orang yang bernada dukungan pada Anas. Seperti narasumber Saiful Umam dalam berita berjudul *Anas Teken Pakta (15/02/13)* yang menyebut-nyebut Anas sebagai politisi yang memiliki nilai tawar lebih dibanding dengan politisi Partai Demokrat lainnya. Selain itu, berita lain berjudul *Anas Tersangka, Masa HMI Demo (27/02/13)*, menunjukkan adanya kelompok loyalis yang cukup mengakar di belakang Anas.

Dari keseluruhan berita yang terbit di koran *Republika*, memang hampir tidak ada nada yang menyudutkan posisi Anas dalam kasus Hambalang, kecuali sebuah pernyataan dari narasumber Ulil Absar abdala yang menyebut anas sebaga "Bayi yang tidak diinginkan", yang kemudian diangkat sebagai judul sebuah berita dan dimuat tanggal 28 Februari 2013. Selebihnya, *Republika* memberitakan anas dan Hambalang pada jarak yang cukup netral, tanpa adanya penyangkutan Partai Demokat dan lembaga-lebaga lain yang pernah disinggahi Anas.

Berita *Republika* terkait kasus korupsi alat kesehatan Provinsi Banten yang menyeret gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, juga memiliki kecenderungan

yang hampir sama dengan koran lain, dimana sebelum ditetapkannya Atut sebagai tersangka pada 17 Desember 2013, tidak ditemukan berita mengenai Atut. *Republika* mulai banyak memuat berita Atut sejak sehari setelah Atut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus alat kesehatan dan suap kepada ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Selama periode 10-16 Desember 2013, tidak ditemukan pemberitaan Atut di harian *Republika*. Namun pada tanggal 18 Desember 2013, sehari setelah Atut ditetapkan menjadi tersangka, *Republika* memuat sedikitnya lima berita terkait. Lima berita tersebut diantaranya berjudul *Atut Akan Ditahan; Korupsi di Banten Sudah Merajalela; Fee dan Instruksi yang Menjerat Atut; Citra Kepala Daerah Makin Negatif*, dan; *Ibu tak Terlibat Korupsi Apapun*.

Dalam semua berita yang dimuat *Republika* tersebut, memiliki kecenderungan yang sedikit menyudutkan posisi Atut sebagai tersangka. Dilihat dari pemberitaan yang dimuat di *Republika*, banyak mengaitngaitkan antara kasus Atut, termasuk hubungannya dengan Partai Golkar.

Republika banyak memberitakan beberapa gambaran Banten yang

disebut-sebut telah menjadi wilayah yang cukup korup, dimana korupsi merajalela di kalangan pejabat pemerintahannya. Hanya saja, pada pemberitaan *Republika* posisi penyudutan terhadap Atut dan Golkar khususnya tidak dinyatakan secara nyata. Berita dan judul yang dimuat *Republika* cenderung samar, seperti berita berjudul *Dana Atut Bisa ke Parpol (19/12/13)*, menunjukkan adanya hubungan antara partai dimana Atut bernaung (Golkar) serta kemana uang Atut bermuara. Dalam berita ini tidak dikatakan secara jelas apakah ada dana dari Atut yang mengalir ke Partai Golkar. Dan hari berikutnya, 20 Desember 2013, Golkar kemudian juga disebut-sebut dalam kasus Atut pada berita yang memuat judul *Kasus Atut Pengaruhi Golkar*. Berita lain sepanjang periode ini mengenai Atut, adalah status Atut dan wakilnya Rano Karno.

Republika pada pemberitaan kasus suap impor daging sapi dengan tersangka presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, sama seperti *Tempo* dan *Kompas*, sebelum penetapan Luthfi sebagai tersangka pada 31 Januari 2013, tidak ditemukan menerbitkan berita yang menyinggung Luthfi. Berita yang dimuat *Republika* pada

tanggal 3 Februari 2013 justru memuat pembelaan Luthfi pada kasus suap daging impor dengan berita yang berjudul *Luthfi Mengaku Tak Tahu (3/02/13)*. Terlebih, *Republika* banyak mengangkat berita yang lebih terfokus pada berbagai gerakan PKS dalam menangani kasus ini.

Republika cenderung menerbitkan berita yang cukup menguntungkan pihak Luthfi dan PKS. *Republika* tidak nampak membeberkan kasus Luthfi sebagai borok PKS, namun lebih pada bagaimana mengungkap fakta tentang Luthfi terutama langkah maju yang dilakukan PKS dalam menanggapi kasus itu.

Terlihat, sejak kasus Luthfi mengemuka *Republika* tidak serta-merta memuat pemberitaan tentang penetapan Luthfi sebagai tersangka oleh KPK. Akan tetapi *Republika* justru banyak menaikkan berita tentang berbagai pembelaan oleh PKS seperti berita dengan judul *PKS Investigasi Kasus Luthfi (5/02/13)* yang dimuat tanggal 4 Februari 2013. Selain itu, *Republika* beberapa kali dalam beritanya juga mempertanyakan kinerja KPK dalam kasus Luthfi. Beberapa berita seperti berita lain yang dimuat tanggal 4 Februari 2013 dengan judul *KPK Bermain*

Petak Umpet (4/02/13), menunjukkan keraguan terhadap badan hukum yang memegang kuasa atas kasus Luthfi tersebut.

KESIMPULAN

Dalam pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan petinggi partai politik seperti Luthfi Hasan Ishaq, Ratut Atut Choisyah, dan Anas Urbaningrum, menjelang pemilu 2014 yang diturunkan oleh *Kompas* dan *Republika* memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Dalam konteks kerja jurnalistik, kedua media nasional ini memang cenderung netral dan telah melakukan kerja jurnalistik sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Akan tetapi, jika dilihat secara kritis dengan menggunakan metode analisis wacana Foucault, terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Perbedaan itu terlihat dari cara membangun wacana dan juga adanya wacana yang dipinggirkan.

Kompas, sebagai surat kabar besar yang dilahirkan dari dua pendiri beragama Katholik dan belakangan dikenal sebagai surat kabar yang 'nasionalis' dan cenderung selalu berada dalam posisi aman terhadap kekuasaan, menyodorkan wacana politik yang berkaitan dengan identitas keagamaan para tersangka, dalam hal ini Islam. *Kompas* seolah ingin menunjukkan bahwa, kasus korupsi yang dituduhkan kepada para

tersangka (Luthfi, Anas, dan Atut) terkait erat dengan identitas keagamaan mereka, dan hal ini terlihat menjadi sangat kontras. *Kompas* justru terlihat menyembunyikan sebuah wacana besar, bahwa perilaku korup bukanlah milik sebuah golongan atau penganut agama tertentu, dan itu sangat ditentukan oleh pribadi masing-masing, bukan oleh agama yang dianutnya.

Sementara *Republika*, surat kabar yang didirikan atas inisiatif Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengembangkan wacana sebaliknya. *Republika* tidak mengangkat wacana agama dalam pemberitaan kasus-kasus itu, melainkan menggiringnya murni ke persoalan pribadi yang dikaitkan dengan urusan politik. Sebaliknya, *Republika* tampak menghindarkan diri dari pemberitaan yang mengaitkan kasus-kasus tersebut dengan identitas keagamaan yang melekat pada para tersangka.

Ideologi media terlihat memainkan peranannya di sini, sehingga antara *Kompas* dan *Republika* terlihat berbeda arah. Akan tetapi, keduanya memiliki kesamaan dalam mengangkat wacana kasus korupsi ini sebagai kasus yang berkaitan erat dengan persoalan politik. Kedua media besar ini justru terlihat 'lupa' untuk membahas satu wacana besar tentang korupsi, yakni bahwa korupsi adalah personal kriminalitas

atau bahkan lebih dari itu, *extra ordinary crime*. Tampak jelas bagi kedua media ini, membahas kasus korupsi dari sisi kriminal tak memiliki 'nilai jual' (*news value*), sehingga memerlukan wacana pendamping yang lebih 'menjual' yakni soal politik dan identitas keagamaan, karena di situ terdapat intrik dan juga kontras yang tentu saja menarik buat para pembaca.

KEPUSTAKAAN ACUAN

- Curran, James. (2002). *Media and Power*. London. Routledge.
- Eagleton, Terry. (1991) *Ideology, an Introduction*. London: Verso
- Ecip, S. Sinansari (2007), *Jurnalistik Mutakhir, Panduan dari Atas Meja*, Jakarta. Penerbit Republika.
- Eriyanto, (2001), *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta, LKiS.
- Given, Lisa M. (2008). *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kendall, Gavin & Wickham Gary (1999) *Using Foucault's Methods*. Thousand Oaks, California: Sage Publication.
- Liliweri, Alo (2011), *Komunikasi, Serba Ada Serba Makna*. Jakarta. Kencana.
- McQuail, Denis (2011), *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi 6 buku 1 & 2, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika
- Miller, Katherine (2005), *Communications Theory: Perspectives, Processes, and Contexts*, Boston, McGraw-Hill
- Wimmer and Dominick (2006). *Mass Media Research*, ThomsonWadsworth, USA
- Wooffitt, Robin (2005). *Conversation Analysis and Discourse Analysis: A Comparative and Critical Introduction*. Thousand Oaks, California: Sage Publication.